

INTEGRASI NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN UNTUK MENCEGAH RADIKALISME DAN EKSTREMISME DI KALANGAN GENERASI MUDA

Oleh:

Eric Sunnardy, Ario Pamungkas, Putri Diana A. T., Rinjani Tirta M. S., Dinda Fitria N.
Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
ericsunnardy@student.esaunggul.ac.id

Abstract

Radicalism and extremism are real threats that can disrupt social, political, and cultural stability in various countries, including Indonesia. The younger generation, as the successors of the nation, are vulnerable to being influenced by radical ideologies due to technological developments, social media, and a lack of understanding of national and civic values. This article aims to examine the role of integrating civic values in education as a strategic step to prevent the spread of radicalism and extremism among the younger generation. This study uses a qualitative approach with a literature study method that analyzes various educational policies, civic curriculum, and the implementation of Pancasila values in formal and non-formal education systems. Civic values, such as tolerance, love of the homeland, solidarity, respect for diversity, and legal awareness, are the foundation for forming the character of a strong and nationally aware young generation. The results of the study show that civic education that is holistically integrated into the curriculum can increase students' critical awareness of the dangers of radicalism and extremism. A learning approach based on local values, interactive discussion practices, and instilling national morals through extracurricular activities can build the resilience of the younger generation against the negative influence of extreme ideologies. In addition, the role of teachers, families, and communities is key in supporting an effective civic education process.

Keywords: *Radicalism, extremism, civic education, civic values, young generation.*

Abstrak

Radikalisme dan ekstremisme merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Generasi muda, sebagai penerus bangsa, rentan terpengaruh oleh ideologi radikal akibat perkembangan teknologi, media sosial, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pendidikan sebagai langkah strategis untuk mencegah penyebaran radikalisme dan ekstremisme di kalangan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang menganalisis berbagai kebijakan pendidikan, kurikulum kewarganegaraan, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. Nilai-nilai kewarganegaraan, seperti toleransi, cinta tanah air, solidaritas, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesadaran hukum, menjadi landasan dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berwawasan kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diintegrasikan secara holistik dalam kurikulum dapat meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap bahaya radikalisme dan ekstremisme. Pendekatan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal, praktik diskusi interaktif, dan penanaman moral kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler mampu membangun daya tahan generasi muda terhadap pengaruh negatif ideologi ekstrem. Selain itu, peran guru, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendukung proses pendidikan kewarganegaraan yang efektif.

Kata kunci : Radikalisme, ekstremisme, pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kewarganegaraan, generasi muda.

Pendahuluan

Radikalisme dan ekstremisme sudah menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kedua ancaman ini tidak hanya membahayakan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga merusak tatanan sosial terutama dikalangan generasi muda saat ini. Generasi muda sering kali menjadi target utama karena rentan terhadap propaganda kelompok-kelompok radikal. Hal ini disebabkan adanya kemudahan berbagai akses mengenai informasi melalui teknologi digital salah satunya *social media* pribadi. (Rahmat, 2018)

Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk memenuhi peran dalam pembangunan dan pembentukan karakter generasi muda saat ini, sehingga mencegah ancaman radikalisme dan ekstremisme, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai “benteng pertahanan” yang pertama dalam hal ideologis.

Melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan, diharapkan generasi muda dapat menjadi salah satu dari berbagai bentuk perubahan yang aktif dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.

Selain mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pendidikan kewarganegaraan juga berfokus pada pengembangan pola pikir yang kritis dan inklusif dalam

lingkup kehidupan mahasiswa. Dengan demikian pendidikan ini sebagai salah satu bentuk sarana untuk memfasilitasi dialog antarbudaya dan memperkuat identitas nasional yang menghargai perbedaan dalam lingkup pertemanan mahasiswa. (Muhammad et al., 2021)

Penelitian menunjukkan bahwa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman, generasi muda dapat menanggapi dan menolak paham-paham radikal yang dapat mengancam persatuan bangsa. (Hamdani & Dewi, 2021)

Kajian Teori

A. Definisi

Radikalisme, sebagai suatu paham yang menginginkan perubahan cepat dan drastis seringkali berbenturan dengan konsep kewarganegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan hukum. Hubungan antar keduanya sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Secara umum Radikalisme adalah sebuah sikap, ideologi, dan tindakan yang menginginkan perubahan besar dan mendasar pada sistem yang ada, baik di ranah politik, sosial budaya, ekonomi, ataupun agama. Radikalisme berasal dari kata “Radix” dari bahasa Latin yang memiliki arti akar. Di mana tujuan utama radikalisme itu sendiri adalah menyebarkan ancaman dan

ingin merubah suatu hal sampai ke akar-akarnya.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah proses pendidikan, yang bertujuan untuk mendidik dan membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikarenakan memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, serta mengenalkan nilai-nilai dan norma yang mendukung keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis juga demokratis.

Untuk mencegah terjadinya radikalisme dikalangan anak muda maka pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu upaya yang efektif dalam pencegahan radikalisme. Dengan menanamkan nilai kebangsaan, mendorong partisipasi aktif, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis maka pendidikan kewarganegaraan bisa membantu pencegahannya.

B. Faktor-faktor

Teori Identify Crisis oleh Eric Erikson (1968) menjelaskan bahwa Krisis identitas, terutama pada masa transisi kehidupan seperti remaja atau dewasa muda dapat membuat seseorang mencari kepastian dalam kelompok atau ideologi yang menawarkan jawaban tegas. Dalam teori ini, masa remaja adalah periode kritis dimana individu mencari jati diri

dan tujuan hidup. Jika pada proses tersebut mengalami gangguan, remaja menjadi rentan terhadap pengaruh ideologi atau kelompok radikal.

1. Krisis identitas: Masa remaja adalah masa perkembangan dimana individu menghadapi konflik anantara identitas dan kebingungan peran (identify vs. role confusion).
2. Kebutuhan akan rasa kepemilikan: Ketika keluarga atau lingkungan gagal memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari komunitas yang memberikan rasa memiliki dan solidaritas, seperti kelompok dengan ideologi radikal.
3. Pemberontakan terhadap otoritas: Remaja sering kali memiliki kecenderungan untuk memberontak terhadap otoritas sebagai bagian dari proses membangun identitas mereka sendiri.
4. Pengaruh peristiwa traumatis: Pengalaman ini menciptakan cognitive opening, yaitu keterbukaan terhadap ideologi baru yang menjanjikan solusi atau makna hidup.
5. Kekosongan nilai atau keimanan: Remaja yang tidak memiliki dasar nilai atau agama yang kuat sering kali mencari

ideologi yang memberikan struktur dan arah dalam hidup mereka.

6. **Kebutuhan Eksistensial:** Erikson menkankan bahwa remaja sering kali memiliki kebutuhan untuk membuktikan eksistensi mereka dalam masyarakat.

C. Kasus radikalisme pada remaja

Contoh ringan radikalisme dikehidupan sehari-hari sering kali terjadi dalam bersikap maupun berperilaku atau sikap yang menunjukkan intoleransi terhadap perbedaan.

Radikalisme dalam remaja seringkali diawali dengan hal kecil seperti penolakan teman karena berbeda pandangan, menyebarkan konten kebencian di media sosial, menolak mengikuti upacara atau aktivitas sekolah, menilai orang secara ekstrem dan yang terakhir eksklusivitas dalam pergaulan. Contoh-contoh tersebut mungkin terdengar ringan, tetapi jika tidak ditangani dengan sigap, hal tersebut dapat berkembang menjadi radikalisme yang lebih serius.

Salah satu contohnya kasus AN (2021), AN adalah seorang remaja yang berusia 16 tahun direkrut oleh jaringan teroris JAD melalui sosial media. AN terdoktrin ideologi radikal yang disebarkan secara daring yang menyebarkan pandangan ekstrem tentang jihad dan menentang pemerintahan yang sah. Polisi menangkap AN di kediamannya. Saat itu ditemukan

bukti berupa bahan peledak dan dokumen terkait rencana serangan teroris.

Kasus ini menunjukkan bahwa radikalisme bisa memengaruhi remaja melalui platform online. Hal ini juga menunjukkan kelalaian pihak orangtua untuk memberikan pengawasan terhadap penggunaan internet oleh remaja. Remaja yang mengalami krisis identitas atau merasa terpinggirkan lebih rentan terhadap pengaruh kelompok radikal yang menggunakan strategi manipulatif untuk merekrut mereka. Penguatan pendidikan karakter dan pengawasan aktivitas daring menjadi langkah penting untuk melindungi remaja dari pengaruh hal negatif tersebut.

D. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan

Menurut Eric Erikson, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membantu individu, terutama remaja untuk mengatasi krisis identitas yang menjadi akar kerentanan terhadap radikalisme. Dalam teori psikososial Erikson, radikalisme dapat muncul jika individu tidak berhasil menyelesaikan konflik identitas dengan cara yang positif.

1. Tahapan identitas vs kebingungan peran: Menurut Erikson, masa remaja adalah tahap perkembangan psikososial yang ditandai oleh konflik identitas vs kebingungan

- peran (identify vs role confusion).
2. Pencegahan pola pikir radikal: Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan prinsip kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia yang bertujuan membentuk pola pikir kritis serta sikap yang toleran
 3. Membentuk rasa kepemilikan bangsa: Erikson menekankan pentingnya rasa kepemilikan dan solidaritas dalam pembentukan identitas
 4. Membantu menyelesaikan krisis nilai: Pendidikan kewarganegaraan menyediakan panduan nilai yang membantu remaja menavigasi konflik ini secara sehat, tanpa terjebak dalam solusi ekstrem seperti radikalisme
 5. Memberdayakan pemahaman tentang keberagaman: Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan pentingnya keberagaman dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, sehingga remaja lebih mampu menghormati pandangan yang berbeda dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal yang menolak pluralisme.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui distribusi angket. Dengan tujuan utama untuk mengukur pengetahuan dan sikap generasi muda terhadap bahaya radikalisme serta pemahaman mereka mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pencegahan radikalisasi. Angket yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian pertama, berisi pertanyaan mengenai demografi responden, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial
2. Bagian kedua, berisi pertanyaan yang dirancang untuk mengukur pengetahuan responden tentang radikalisme dan ekstremisme, termasuk faktor-faktor penyebab, dampak sosialnya, serta upaya pencegahan
3. Bagian ketiga menguji sikap dan pandangan responden terhadap peran pendidikan kewarganegaraan dalam pencegahan radikalisasi. Termasuk pertanyaan yang relevan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam menghindari pengaruh ideologi ekstrem.

Metodologi Penelitian

Sasaran angket adalah generasi muda yang mencakup siswa dan mahasiswa, baik yang mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan platform survei, seperti *Google Forms* atau survei online lainnya, untuk mempermudah akses responden yang tersebar di berbagai daerah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan sikap generasi muda terhadap radikalisme dan pencegahannya. Hasil penelitian akan memberikan wawasan tentang seberapa besar pengaruh pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pemahaman dan sikap mereka terhadap isu ini.

Keabsahan angket dijamin melalui pengujian validitas dan reliabilitas, dengan memperhatikan hasil uji coba sebelumnya pada kelompok kecil untuk menjamin bahwa instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Keunggulan penggunaan angket dibandingkan dengan metode lain, yaitu: Angket dapat memberikan data yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi kepada kelompok yang lebih besar. Juga, angket menghasilkan analisis data kuantitatif yang lebih mudah diproses dan disajikan secara statistik.

Dengan demikian, penggunaan angket dapat menjadi metode yang efektif dalam penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana generasi muda memahami dan merespon ancaman radikalisasi serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk berperan dalam upaya pencegahan.

Pembahasan

Dalam beberapa decade terakhir, masyarakat internasional menghadapi ancaman nyata dari kelompok radikal dan terorisme, yaitu munculnya kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau juga dikenal dengan nama lain sebagai ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), adalah kelompok jihad sunni yang memiliki ideologi kuat dan mengklaim memiliki kekuasaan penuh atas seluruh umat Islam.

Dalam sejarah Indonesia, peristiwa radikalisme dan terorisme sudah sering terjadi sejak era kemerdekaan. Indonesia pernah menghadapi bahaya pemberontakan selama masa Order Lama. Karena bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, tindakan pemberontakan ini pasti mengancam eksistensi dan kedaulatan negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 (10) UUD 1945, Indonesia adalah Negara Kesatuan republik, dan dalam Sila 1 dan 3 dinyatakan bahwa Indonesia mengakui keberagaman budaya, keyakinan, dan persatuan.

Radikalisme menyebar di Indonesia dengan dua cara, yaitu: Cara pertama dengan melalui organisasi non-pemerintah atau

biasa dikenal sebagai *Non-government Organization* (NGO). Sebenarnya, NGO di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an.

Namun, tindakan mereka sebagai kelompok yang sangat kritis terhadap negara, baru berkembang sejak dekade awal 1990-an. LSM atau NGO, melakukan beberapa program kegiatan untuk mendapat sokongan dana dari pihak lain.

Cara kedua dengan membentuk kelompok pengajian atau belajar seperti liqo' atau suroh dan atau membentuk ormas sipil informal.

Kelompok pengajian atau kajian, serupa dengan LSM atau NGO yang menjadi bagian dari gerakan internasional yang berakar di negara-negara Barat, juga terintegrasi dalam jaringan global yang berpusat di Timur Tengah. Ragam ideologi yang mereka anut pun bervariasi, mulai dari yang tidak melibatkan urusan politik seperti Jamaah Tabligh, yang berfokus pada agenda politik seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga yang memiliki kecenderungan radikal seperti Salafi Jihadi.

Selain yang berakar dari agama Islam, kelompok fanatic keagamaan baru dari agama Kristen, Hindu, dan Buddha, baik yang bercorak moderat maupun radikal, juga mulai muncul dalam jumlah besar pada pertengahan tahun 1990-an.

Radikalisme sering kali muncul sebagai respons ketidakadilan sosial yang terjadi di Masyarakat

dan ekonomi. Di Indonesia sendiri radikalisme pada generasi muda dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi, kondisi sosial-politik, dan komitmen agama. Faktor-faktor tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya, yang pada akhirnya memicu melakukan perubahan dengan cara yang ekstrem.

Radikalisme dengan kewarganegaraan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Radikalisme, sebagai suatu paham yang menginginkan perubahan secara cepat dan radikal, seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang menjunjung tinggi toleransi, kesetaraan, dan hukum. Penafsiran kewarganegaraan yang sempit menjadi salah satu munculnya radikalisme. Kelompok radikal seringkali memiliki penafsiran yang sempit terhadap kewarganegaraan. Mereka cenderung mengedepankan identitas kelompok tertentu (suku, agama, atau ideologi) dan mengabaikan identitas nasional. Orang yang berbeda dari kelompok dominan cenderung dianggap "Bukan bagian" dari negara, menciptakan diskriminasi dan marginalisasi. Pandangan sempit ini membuat perpecahan kelompok masyarakat menjadi "kami" dan "mereka" yang bisa meningkatkan konflik sosial. Orang-orang yang merasa tersingkirkan karena penafsiran tersebut dapat menjadi sararan mudah bagi kelompok radikal

yang menawarkan identitas alternatif yang memberikan rasa kepemilikan dan tujuan. Salah satu contohnya adalah diskriminasi terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura (2012) karena Syiah dianggap berbeda dalam ajaran dan praktikan dari mayoritas Muslim di

Indonesia. Pada kejadian itu dimana kelompok Syiah diusir dari desa mereka setelah rumah-rumah mereka dibakar oleh massa. Konflik ini menyebabkan puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam pengungsian.

Solusi untuk masalah ini adalah Penafsiran Kewarganegaraan harus dilakukan secara inklusif, yaitu dengan menekankan hak dan kewajiban setiap warga tanpa memandang latar belakang mereka.

Penolakan terhadap negara oleh kaum radikal sering juga terjadi karena mereka menganggap sistem pemerintahan atau ideologi negara tidak sesuai dengan keyakinan atau agenda mereka. Selain itu, Ketimpangan sosial, korupsi, dan ketidakadilan sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk meradikalisasi individu. Pengaruh eksternal dari luar juga mempengaruhi orang-orang yang sudah berpikiran radikal, Ideologi radikal seperti ISIS mempengaruhi cara pandang kelompok radikal di Indonesia. Sejak munculnya ISIS di Timur Tengah, sejumlah warga Indonesia terpengaruh ideologi mereka. ISIS menganggap negara-

negara modern sebagai tidak sah karena tidak menerapkan sistem kekhalifahan. Pendukung ISIS sering menolak mengakui hukum dan pemerintahan Indonesia, bahkan ada yang berusaha mengganti dasar negara dengan ideologi Khalifah. Adanya hal ini tentu berdampak ke Indonesia, karena aksi tersebut menciptakan aksi terorisme, seperti bom bunuh diri dan serangan terhadap aparat keamanan. Solusi untuk masalah ini Pemerintah harus menjadi lebih tegas lagi dalam menangani gerakan radikal yang bertentangan dengan konstitusi. Dari hal diatas dapat disimpulkan juga bahwa Radikalisme merupakan ancaman serius terhadap kemananan negara karena dapat memicu tindakan yang mengancam stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Kelompok radikal sering berusaha menggantikan sistem negara yang ada dengan ideologi ekstrem mereka, yang dapat menyebabkan konflik internal hingga aksi kekerasan. Selain itu aksi radikalisme juga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, kelompok radikal seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik terhadap anggota kelompok mereka sendiri maupun terhadap kelompok lain.

Jika tidak ditangani dengan serius Radikalisme memiliki potensi untuk meruntuhkan negara. Hal ini terjadi karena radikalisme merongrong fondasi negara melalui ideologi ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan menciptakan

instabilitas politik, sosial, dan keamanan.

Penolakan yang dilakukan kaum radikal dapat melemahkan kesepakatan kolektif yang menjadi dasar berdirinya negara.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting,

Pendidikan kewarganegaraan secara sistematis menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, pluralisme, dan rasa persatuan. Nilai-nilai menjadi benteng pertahanan yang kuat melawan paham radikal yang cenderung eksklusif dan intoleran. Selain itu Pendidikan kewarganegaraan juga membantu individu memahami sejarah, budaya dan sistem pemerintahan negaranya. Dengan pemahaman yang mendalam ini, individu akan lebih menghargai keberagaman dan persatuan bangsa.

Pada era modern ini pendidikan kewarganegaraan mendorong kaum muda untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara lebih objektif. Hal ini membantu mereka membedakan antara informasi yang benar dan hoaks yang seringkali disebar oleh kelompok radikal untuk memicu. Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk karakter yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Individu dengan karakter yang kuat akan lebih sulit dipengaruhi oleh propaganda radikal.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian

Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2010, sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan dukungan terhadap tindakan radikal. Persetujuan atau penerimaan terhadap nilai tertentu merupakan tahap awal dari lima tahap dalam ranah sikap atau afektif seseorang menurut model David R.

Jika persetujuan terhadap tindakan radikal tersebut dibiarkan, hal ini dapat mengarah pada perkembangan kepribadian yang cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Proses penanaman radikalisme, setidaknya dalam tataran pemikiran, telah memperoleh dukungan di kalangan masyarakat sekolah. Sudah banyak kasus radikalisme agama yang menyasar kaum muda yang masih berstatus pelajar.

Seperti pada tahun 2011 dimana 3 pelajar di Klaten diduga sebagai teroris dan ditangkap oleh kepolisian. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, pendidikan kewarganegaraan dapat mencegah munculnya sikap ekstrem dan intoleran yang menjadi akar dari radikalisme.

Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan suatu bangsa. Dengan saling menghormati dan memahami, individu akan lebih mudah menerima serta menghargai perbedaan yang ada.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu metode dalam

taraf pendidikan yang paling efektif dalam mencegah radikalisme. Dengan ajaran yang mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan kemampuan beripikir kritis, dan mendorong partisipasi aktif, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu generasi muda yang berkarakter, toleran, dan cinta tanah air.

Selain itu, Pancasila juga berperan penting sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat banyak nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, tindakan radikalisme dapat dicegah.

Kesimpulan

Radikalisme dan ekstremisme merupakan salah satu bentuk ancaman yang sangat serius terhadap stabilitas sosial, politik, dan budaya, di manapun terutama di Indonesia. Generasi muda zaman sekarang sangat mudah terpengaruhi oleh ideologi radikal akibat kemajuan teknologi dan media sosial. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk karakter generasi muda untuk menangkal ancaman tersebut.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleransi, cinta tanah air, solidaritas, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesadaran hukum ke dalam kurikulum, pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran kritis siswa. Pendekatan berbasis

nilai-nilai lokal, diskusi interaktif, dan kegiatan ekstrakurikuler sangat membantu membangun daya tahan terhadap ideologi ekstrem.

Selain itu, guru, dosen, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Pancasila, sebagai pedoman hidup berbangsa, juga memiliki peran signifikan dalam mencegah radikalisme. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, generasi muda dapat menjadi individu yang toleran, cinta tanah air, dan mampu menghadapi tantangan ideologi radikal.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membentuk karakter tetapi juga memperkuat persatuan dan keberagaman bangsa, menjadikannya alat strategis dalam upaya pencegahan radikalisme.

Daftar Pustaka

- Rahmat, M. (2018). Radikalisme di Kalangan Generasi Muda: Analisis Penyebab dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 34-45.
- Muhamad, R., et al. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. *Educatio*, 7(3), 1270-1279.
- Hamdani, A., & Dewi, S. (2021).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(3), 226-232.

Radicalism. *Research on Humanities and Social Sciences*.

- Arianti, A., Salsabilla, E., Adhim, M., Hendri, N., Fitri, N., Febriani, S., & Hudi, I. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja Gen Z. *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*.
- Mulyono, G. P., dan Mulyoto, G. P. 2017. RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA (Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan). *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64.
- Nusarastrिया, Y. H. 2015. Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan). *Pax Humana*, 2(2), 189–204. Diambil dari <https://www.jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/4>
- Satria, B. M. ... Margaretha Sutomo Putri, A. 2023. *Upaya Pencegahan Potensi Radikalisme dengan Penanaman Ideologi Pancasila di Lingkup Sekolah*. *Journal of Education Research* (Vol. 4).
- Surryanto D. Waluyo, dan F. G. Cempaka Timur. 2020. The Implementation of Bela Negara Value in Citizenship Education in the Efforts to Prevent